

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BENCANA BANJIR DI KECAMATAN DAYEUKOLOT KABUPATEN BANDUNG

**Sugih Candra Kayat**

*email : sugih.ck01@gmail.com*  
STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi

### ABSTRACT

*The expansion of an establishment makes a new problem in the surrounding environment so that claims to a safe state, from regional disasters, especially flood disasters in the Dayeuhkolot District, Bandung Regency, become a common interest, especially residents affected by flood disasters in the sub-district, significant population development makes a new challenge for all parties affected. However, the dedication of all sectors involved in the implementation of the distribution of social assistance for flood victims is in accordance with common expectations. As well as in the important sector of assistance from the informal sector in the implementation of the distribution of community contributions channeled does not run effectively. Based on these problems, the study is intended to describe how the implementation of policies, obstacles and efforts made in the process of implementing policies in the distribution of social assistance to victims affected by the disaster. The form of study in this research uses a strategy that emphasizes the quality of the entity. Data collection is done through consultation, observation, and processing. The data description used is an explication model, where the data collected is then described in the form of an interpretative description above. Based on the research, the obstacles faced by the local government of Bandung Regency in implementing the policies for the distribution of social assistances for flood victims include a lack of awareness of the duties and function of a related organizations, people who tend not to understand the existence of regional regulations which contain policies regarding the implementation of aid distribution, social victims of the flood disaster in Dayeuhkolot sub-district.*

Kata Kunci : Social assistance distribution, Social assistance distribution policy, Expansion Model

### ABSTRAK

Ekspansi suatu pembentukan menjadikan suatu permasalahan baru dalam lingkungan sekitar sehingga klaim terhadap keadaan yang aman, dari bencana daerah khususnya bencana banjir di daerah Kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung menjadi kepentingan Bersama khususnya warga yang terdampak bencana banjir di kecamatan tersebut, Perkembangan penduduk yang signifikan menjadikan suatu tantangan baru bagi seluruh pihak yang terkena dampak tersebut. Akan tetapi darma dari seluruh sektor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir yang sesuai dengan harapan bersama. Serta dalam sektor pentingnya bantuan dari sektor informal ini dalam pelaksanaan penyaluran kontribusi kemasyarakatan yang disalurkan tidak berjalan

efektif. Berlandaskan permasalahan tersebut maka pengkajian di maksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan, hambatan-hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial korban yang terkena dampak bencana tersebut. Bentuk kajian dalam penelitian ini mempergunakan strategi yang menekankan pada sisi kualitas entitas. Pengumpulan data dilakukan melalui cara konsultasi, pengamatan, dan pengolahan. Penjabaran data yang digunakan adalah model eksplansi, dimana data yang dikumpulkan kemudian dijabarkan gambaran penafsiran berupa uraian di atas tersebut. Berdasarkan penelitian, hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir antara lain adalah kurangnya kesadaran akan tugas dan fungsi organisasi yang berkaitan, masyarakat yang cenderung belum memahami akan adanya peraturan daerah yang berisi mengenai kebijakan tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir di kecamatan Dayeuhkolot.

Kata Kunci : Penyaluran bantuan sosial, Kebijakan penyaluran bantuan sosial, Model Eksplansi

---

Submitted: 31-08-2023 | Accepted: 31-08-2023 | Published: 31-08-2023

---

## 1. Pendahuluan

Wilayah Kabupaten Bandung termasuk daerah yang rawan bencana alam terutama banjir. Bencana banjir yang selalu berulang di beberapa kecamatan dan berdasarkan data yang ada di BPBD Kabupaten Bandung tercatat bahwa jumlah kecamatan yang terendam banjir terjadi di 10 Kecamatan.

Bencana musibah banjir yang terjadi di kecamatan Dayeuhkolot bermula karena intensitas hujan yang tinggi serta daya tampung sungai yang kurang. Dimana ketinggian air saat banjir terjadi dari 50 centimeter sampai 500 centimeter, yang merendam 6361 rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Data tersebut sesuai data terakhir di tahun 2020 korban bencana banjir yang terakhir pada tahun 2020 berjumlah 11.659 KK dengan jumlah korban bencana banjir sebanyak 40.844 jiwa. Mengenai jumlah kondisi tersebut terkait dengan bantuan sosial dapat dijelaskan di grafik berikut :

Grafik . 1.1

Penerima Bantuan Sosial Korban Banjir

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2019 -2020

No	Jumlah korban	Jumlah penerima bansos	Jenis bantuan	Keterangan
1	104 000 jiwa pada tahun 2019	52 ribu Jiwa (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakaian</li> <li>• Obat-obatan</li> <li>• Kebutuhan pokok</li> <li>• Perahu karet</li> </ul>	Berdasarkan keterangan tersebut dari data hanya 50%(2019)dan 60% (2020) korban bencana banjir yang menerima bantuan sosial
2	40.844 jiwa pada tahun 2020	25.422 Jiwa (Tahun 2020)		

Sumber:BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2021

Dari gambaran grafik dapat disimpulkan ternyata meski ada peningkatan dari jumlah korban bencana banjir yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah di kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, namun masih belum efektif karena tidak semua korban bencana banjir yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Dimana seharusnya bantuan sosial bagi korban banjir yang tidak pernah luput datang setiap terjadi banjir setidaknya dapat diprediksi oleh pemerintah daerah, tetapi realitas yang terjadi terkesan hanya diberikan kepada sebagian korban banjir tidak semua korban banjir menerimanya. Hali ini dapat menimbulkan resiko sosial yang memiliki potensi terjadinya kerentanan sosial.

Bencana alam banjir di Kecamatan Dayeuhkolot yang paling parah terjadi di Desa Citeureup yang berakibat lumpuhnya sendi-sendi ekonomi dan perdagangan masyarakat dengan meluapnya sungai Citarum dan Cikapundung dengan debit air yang melebihi kapasitas saluran air yang tersedia. Berbagai upaya memang terlihat dilakukan pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Bandung maupun pemerintah provinsi, tetapi belum mampu melahirkan solusi yang efektif.

Upaya yang dilakukan pemerintah yang belum mampu melahirkan solusi yang efektif dapat saja terjadi karena adanya fenomena dalam penyaluran bantuan sosial kepada korban banjir seperti:

- Keterlambatan bantuan yang diberikan
- Tidak meratanya yang menerima bantuan sosial
- Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan harapan
- Bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran
- Bantuan yang didistribusikan tidak sampai kepada korban bencana banjir

Dalam kaitan dengan permasalahan diatas, terdapat Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 pasal 1 ayat 16 yang menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sementara yang mengatur cara penyaluran bantuan sosial saat kejadian dan setelah kejadian bencana banjir dan dengan tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat 23 bahwa penyaluran dana tersebut melalui transfer langsung ke penerima hibah atau melalui organisasi kemasyarakatan berupa uang yang kemudian di salurkan kepada korban bencana banjir kebanyakan sudah berupa barang pokok.

Sementara proses untuk penyaluran dijelaskan cara tegas pula pada pasal 21 ayat 3 dan 4 bahwa penyaluran bantuan dari yang diperoleh penerima bantuan dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjiani Hibah Yang Bersumber Dari Pendapatan APBD/APD. Selanjutnya dana diberikan kepada penerima bantuan melalui transfer dari pemberi bantuan kepada rekening penerima bantuan, namun demikian untuk mendapatkan bantuan sosial khususnya yang di berikan oleh pemerintah harus memenuhi kriteria yang telah di jelaskan pula pada pasal 5 ayat 5 yaitu:

1. Alokasi yang secara spesifik telah ditetapkan
2. Tidak terikat
3. Bersifat sementara
4. Terdapat nilai positif untuk semua pihak
5. persyaratan penerima hibah/bantuan yang terpenuhi

Berdasarkan penjelasan tersebut pentingnya implementasi kebijakan bantuan sosial menjadi sangatlah penting karena dari aturan yang ditetapkan tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup korban bencana, khususnya korban bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Serta implementasi kebijakan pun sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial khususnya korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Bertitik tolak dari pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih teori dari Charles O Jhones (1996:166) yang memiliki dimensi aktivitas pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, dengan pertimbangan bahwa teori tersebut diasumsikan dapat mengungkap secara mendalam mengenai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti menuangkan ke dalam usulan penelitian dengan judul : "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Bencana Banjir Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung."

## **2. Kajian Pustaka**

Santoso (1993) dalam Winarno (2012 : 22) membagi kategori tentang pemahaman kebijakan publik menjadi :

1. Pendapat para ahli yang menyamakan aturan dengan tindakan-tindakan pemerintah. Dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
2. Para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah dan bertujuan dan maksud. Mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut Panji Santosa (2012:34) rumusan kebijakan berkenaan dengan persoalan bagaimana masalah- masalah publik memperoleh perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana usul-usul kebijakan dirumuskan untuk menanggapi masalah-masalah tertentu, dan bagaimana sesuatu usul kebijakan tertentu dipilih di antara begitu banyak pilihan.

Aspek ini amat erat hubungannya dengan salah satu pokok bahasan dalam administrasi publik, yakni konsep kepentingan publik. Dalam konsep ini dipertanyakan siapakah yang benar-benar merumuskan kebijakan, batas antara organisasi publik dan privat, dan penggunaan teknik- teknik analisis dalam memilih berbagai alternatif.

Pandji Santosa (2012:34) mengatakan bahwa kebijakan publik lahir dari adanya tuntutan kebijakan (*policy demands*). Suatu tuntutan yang ditujukan kepada para pejabat publik oleh para pelaku dalam sistem politik dalam suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan manusiawi, ketidakpuasan atau perampasan. Terhadap masalah ini kemudian dilakukan hal yang disebut penanggulangan.

Mazmanian dan Sabatier (1983: 20) menyatakan :"*Implementation is carryng out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court dcisions. Ideally that decisions identifies the problem(s) to be adressed, stimulate(s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact- both intended and unitended of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions for attempted revisions*) in the basic statute" Teori tersebut menunjukkan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar atau dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

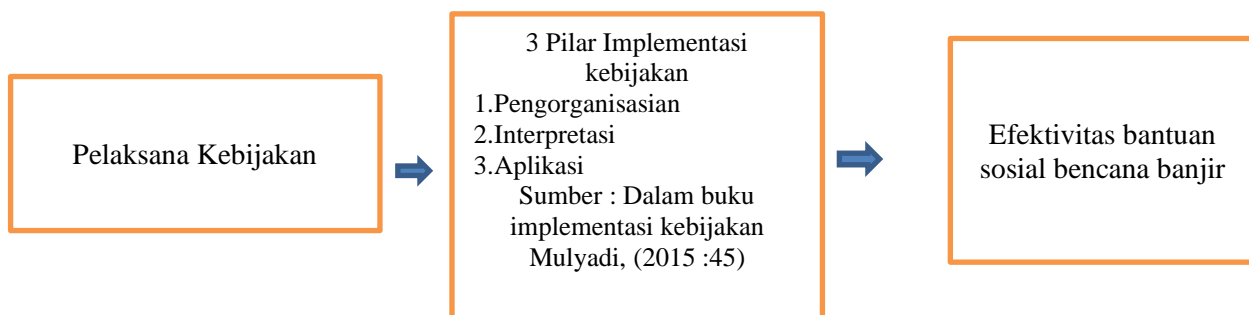
Sebagai sebuah proses, terdapat tahapan yang berlangsung. Sebagai awal adalah perumusan kebijakan, output kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksana- kannya keputusan keputusan tersebut oleh kelompok kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan perbaikan terhadap kebijakan atau undang- undang/ peraturan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.

Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan

dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan, perbedaan dapat muncul antara pernyataan kebijakan (*policy statement*) dengan hasil kebijakan (*policy outputs*). Mungkin persoalannya lahir dari dampak kebijakan. Dampak memancarkan hasil kebijakan, yang tentu saja dapat berlainan dengan pernyataan kebijakan. Dampak kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari implementasi kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebijakan adalah apa yang oleh Pressman dan Widavsky dalam Pandji Santosa (2012:43) disebut sebagai "kompleksitas tindakan bersama" Pendekatan sistem adalah amat penting dalam kebijakan publik, karena setiap kebijakan mempunyai dampak dan reaksi berantai, baik maupun tidak. Selama masa formulasi, diperlukan pertimbangan-pertimbangan serius mengenai kemungkinan terjadinya konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan konsekuensi yang akan muncul pada tahapan implementasi kebijakan. Kesulitannya, hampir-hampir tidak mungkin untuk mengetahui adanya konsekuensi-konsekuensi mendatang.

Keterbatasan dalam hal usaha manusia dapat terjadi dan meliputi keseluruhan masalah serta situasi yang akan datang. Eksperimentasi sosial, yang melibatkan penggunaan eksperimen terkontrol, baru mulai dikembangkan untuk menguji efek-efek yang mungkin muncul dari sesuatu program, sebelumnya ia dirangkum sebagai suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :



## **Model konsep**

Model dan metode yang digunakan adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif terdapat studi deskriptif, studi kasus, biografi, etnografi, grounded theory, dan fenomenologi. Dalam kasus ini, Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah mengungkap, memahami, menggali subjek penelitian ini dengan metode kualitatif, melalui teknik wawancara.

## **Sumber Pengumpulan Data**

Peneliti menganalisis data berupa kata-kata dalam bentuk asli. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara secara mendalam, deskripsi yang lengkap, serta review dokumen secara cermat. Terjadi hubungan langsung dengan orang-orang yang diteliti di lapangan sehingga terdapat proses empati, netral dan mindfulness. Netralitas diperlukan dari peneliti dalam hal menghadapi temuan. Peneliti diharapkan menggunakan netralitas empatis agar dapat bersikap netral.

Sebagai perspektif fenomenologis, maka butuh penekanan nilai empati yang mengacu pada kapasitas unik manusia untuk mengambil dan memahami kondisi, posisi, perasaan, pengalaman dan cara pandang pihak lain. Dynamic Systems Penelitian kualitatif melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai suatu yang akan statis dan tidak mungkin berubah dalam perkembangan kondisi dan waktu. Minat peneliti kualitatif adalah mendeskripsikan dan memahami proses dinamis yang terjadi berkenaan dengan gejala yang diteliti.

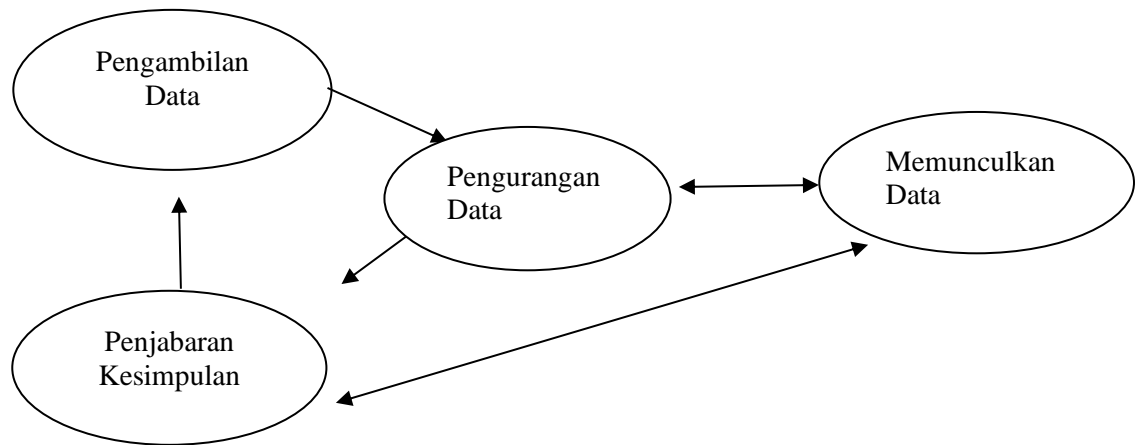
## **Unit Analisis**

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan sesuai dengan pendapat dengan Faisal (1999:11), yaitu pengurangan, sajian data dan kesimpulan serta verifikasi.

Proses analisis data adalah sebagai berikut :



Data diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Informasi acuannya menggunakan pertimbangan kedalaman pengetahuan informan. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada seorang informan namun dalam jangka waktu yang berbeda. Konsistensi jawaban informan terhadap pertanyaan yang sama tersebut dijadikan acuan bagi pengukuran reliabilitas data. Dalam hal menjaga reliabilitas dan validitas, penulis juga melakukan crosscheck data maupun informasi serta mengkonfrontir data diantara para informan.

Operasionalisasi parameter yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Parameter**

ASPEK	ASPEK KAJIAN	PARAMETER	SUMBER DATA
Implementasi Kebijakan	Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan tim penanggulangan bencana</li> <li>▪ Kecukupan jumlah aparat pelaksana.</li> <li>▪ Kecukupan sumber dana.</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala BPBD</li> <li>▪ Tim Korlap Tanggap Bencana</li> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala Desa</li> </ul>

Interprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan program Bantuan.</li> <li>▪ Pelaksanaan program Bantuan.</li> <li>▪ Konsistensi aparatur pelaksana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala BPBD</li> <li>▪ Anggota DPRD</li> <li>▪ Pelaksana Lapangan</li> </ul>
Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan program Bansos</li> <li>▪ Pembagian tugas penyaluran Bansos</li> <li>▪ Ketercapaian/ keberhasilan tepat sasaran penerima Bansos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala BPBD</li> <li>▪ Anggota DPRD</li> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala Desa</li> <li>▪ Ketua RW dan RT</li> <li>▪ Tokoh Masyarakat</li> </ul>

### 3. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dari hasil kajian peneliti melalui teori Charles O'jhon dengan pendekatan aspek : pengorganisasian,interpretasi dan aplikasi melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung,bahwa pelaksanaan dalam penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir sudah berjalan meski masih ada korban bencana banjir yang belum mendapatkan bantuan. Hal tersebut disebabkan adanya kendala atau kesulitan saat pendistribusian dukungan baik moril dan moral untuk korban bencana banjir di kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung seperti: jalan menuju ke tempat bencana yang terjal,sarana untuk penyaluran yang kurang, serta jumlah pelaksana yang menyalurkan bantuan korban bencana banjir yang sedikit yang menyebabkan penyaluran bantuan korban bencana banjir menjadi terhambat.

Hal tersebut dibuktikan pada data penerimaan bantuan tahun 2020.Salah satu penyebab dari penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir,karena terhambat dari alat transportasi yang digunakan sangat sedikit dan sulitnya akses dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir,serta masih ada korban bencana yang masih enggan direlokasi ataupun dipindahkan ke tempat pengungsian, karena memilih tetap bertahan

tinggal dirumahnya yang akses menuju rumahnya sulit dijangkau oleh perahu karet milik penyalur bantuan korban bencana.

Itulah yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir serta sementara kendala lain ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara penyaluran bantuan dan program-program bantuan sosial khususnya untuk korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot yang seharusnya pihak berwenang sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang program-program bantuan sosial khususnya korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Kemudian peneliti menemukan kekurangan dari teori yang dilakukan melalui pendekatan teori O'Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih dinilai kurang sebaiknya di tambah beberapa dimensi seperti komunikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan bantuan sosial korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang telah dilakukan dinilai sudah baik. Hasil wawancara kepada korban bencana banjir meski di lapangan masih ada korban bencana banjir yang masih belum mendapatkan bantuan itu dikarenakan beberapa hal kendala yang terjadi di lapangan saat penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir.

Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan melalui pendekatan teori jones dengan menggunakan aspek : pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih ada kekurangan yang seharusnya ditambah beberapa dimensi seperti: komunikasi, evaluasi dll. Sementara proses pelaksanaan penyaluran dana bantuan korban bencana daerah khususnya bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung meliputi langkah-langkah yang komprehensif dalam arti langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dijalin kerjasama dengan instansi lain atau berbagai pihak sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir yang telah dilakukan oleh

BPBD Kabupaten Bandung dengan melakukan pembinaan mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat formal maupun informal serta melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan dengan mengundang para korban bencana dan masyarakat terkait untuk diberikan pengarahan mengenai perbup tersebut sehingga masyarakat dalam hal ini khususnya para korban bencana dapat mengetahui, memahami dan menjalankan aturan tersebut yang mana proses tersebut dirasa lebih efektif oleh BPBD Kabupaten Bandung Sehingga dapat terwujud cita-cita bersama yakni penyaluran bantuan sosial korban bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang terlaksana sesuai harapan bersama dan tepat sasaran.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino (2001:17): Kebijakan Pemerintah. Malang:Puspek adverrius
- Ali dan Alam (2012:8-9): Unsur-unsur Kebijakan. Bandung:Tarsito
- Ayuningtyas (2014:8): Kebijakan Publik. Jakarta:Erlangga
- Berry &Parasumarna,Zeithami (1990:56 ) Kebijakan Publik.Jakarta: Universitas Terbuka
- Eyestone Robert (2005:23): Kebijakan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka
- Frankin dan Ripley (1990:106): Kebijakan Publik. Bandung:Pustaka Setia
- Gaebler dan Osborne (1992:95):Kapitalisme Birokrasi. Malang:Puspek adverrius
- Gie Liang (1992:122):Ilmu Politik.Yogyakarta:UGM
- Hoogerwef (1978:9): Tujuan Kebijakan Pemerintah. Jakarta :Gramedia
- Horn Van Metter Van ( 1975 : 464 ) A Model Of The Policy Implementation. Malang:Puspek adverrius
- Jones O Charles (1996:166): Implementasi Kebijakan Dalam Organisasi Jakarta :Gramedia
- Kurniadi Budi (2018:20): Generasi Muda dalam Perspektif Etika Politik:Jurnal Sosial Politik
- Leslie A. Pal (2010:11): Tindakan Pemerintahan. Bandung:Alfa Beta
- Mulyadi (1984:33):Mengukur Keefektifan Organisasi. Bandung :Alfa Beta
- Nigro And Nigro (1991:25):*Modern Public Adiministation*. Washingtong DC:Congresional Quarter press.
- Oktasari ( 2015:45): Analisis Kebijakan.Jakarta : Buku Beta
- Pasolong Harbani (2010) : Kebijakan Publik dan Sumber Daya Masyarakat. Jakarta:Bumi

Aksara

Raksasastaya (1976:45 ): Kebijakan Pemerintah.Jakarta :Gramedia

Santosa Pandji (2020:171):Manajemen Pemerintahan Dan Pelayanan Birokrasi.Bandung :

Logoz

Santosa Pandji (2012:36):Administrasi Publik.Bandung:PT Refika Aditama

Smallwood dan Nakamura ( 1980:54 ): Studi Kebijakan Publik.Bandung :Alfa Beta

Sugiyono Alwasih (2005::11): Penelitian Kualitatif.Bandung : Alfa Beta

Sunggono Bangbang (1994:67): Faktor-Faktor melaksanakan kebijakan.Jakarta : Rajawali

Press

Surachmat (1982:13): Penelitian Kualitatif bersifat Induktif.Jakarta :Ghalia Indonesia

Sutoja (2015:34 ): Implementasi Kebijakan.Yogyakarta: Graha Ilmu

Syaf'I (2006:105): Unsur Kebijakan Publik Jakarta :Gramedia

Syahida (2014:34 ): Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: Graha Ilmu

Tahir (2014:78 ): Kebijakan Publik &Transparansi.Jakarta : Alfa Beta

Wisnu Dicki (2005:34): Teori Organisasi .Malang : UMM Press

## Lampiran

1



2

